

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi utama pembangunan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri ialah kategori usaha yang meliputi berbagai jenis bisnis yang dioperasikan baik individu atau kelompok dari skala kecil hingga menengah. Adapun pengertian UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, yang menggolongkan UMKM menjadi tiga kategori utama: usaha mikro, usaha kecil, serta usaha menengah. UMKM mendistribusikan kontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, membangun lapangan kerja, dan memajukan pendapatan masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama terhadap kemajuan ekonomi negara. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyalurkan hasil-hasil pembangunan dan mempercepat proses pemerataan ekonomi di berbagai daerah (Raja et al., 2023).

Saat ini, kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan harapan yang tinggi meskipun masih menghadapi beragam tantangan. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), bahwa hingga tahun 2023, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta unit memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) nasional, yang mana hal tersebut ekuivalen dengan Rp9.580 triliun. Meskipun begitu, terdapat sekitar 67% pelaku UMKM yang masih berjuang dalam mempertahankan bisnis mereka sembari menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi digital dan permodalan.

Adapun tantangan-tantangan yang dialami oleh UMKM tak luput dari permasalahan ibarat lemahnya jaringan usaha, terbatasnya kemampuan penetrasi pasar serta diversifikasi pasar, kecilnya skala ekonomi yang berimbas pada sulitnya penekanan biaya, margin keuntungan sangat kecil, serta tidak adanya keunggulan kompetitif (Fitriani et al., 2023). Di sisi lain, UMKM tetap harus mengutamakan bentuk persaingan, mengingat UMKM juga harus menghadapi perusahaan besar yang mempunyai sumber daya lebih melimpah, termasuk keunggulan dalam hal skala dan strategi pemasaran. Selain itu, regulasi dan birokrasi juga menjadi tantangan bagi sebagian UMKM, dengan hambatan berupa aturan yang kompleks dan proses birokrasi yang dapat menghambat perkembangan usaha (Syafriana et al., 2024).

Terkait regulasi mengenai UMKM, pemerintah DKI Jakarta cukup tegas akan upayanya dalam menaungi eksistensi pelaku UMKM yang ditakutkan kurang mampu berpacu dengan pelaku usaha skala besar (Puspita Sari & Ismawati, 2022). Salah satu regulasi penting yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran, yang mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan dalam membina pelaku UMKM dengan menyediakan ruang usaha minimal 20% dari total luas area komersial. Hal ini bertujuan

untuk menciptakan kesempatan bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar yang lebih besar dan mendapatkan akses ke pelanggan yang lebih luas.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta turut mengajukan usulan untuk menyusun Perda baru terkait UMKM. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi pelaku UMKM, khususnya mengenai lokasi usaha serta perlindungan dari pengusuran. Regulasi lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, yang menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja, dirancang guna memberikan kemudahan serta perlindungan bagi UMKM. Aturan ini mencakup penyederhanaan proses perizinan serta dukungan berupa pembinaan dan fasilitas dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang terdapat pada Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, UMKM di DKI Jakarta menembus jumlah 79.992 pada tahun 2023. Yang dimana, jumlah UMKM pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 45.01 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 55.163 pelaku UMKM. Berikut merupakan grafik peningkatan pelaku UMKM DKI Jakarta periode 2021-2023:



**Gambar 1. 1 Kenaikan Pelaku UMKM DKI Jakarta Tahun 2021-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, Jakarta Barat dan Jakarta Timur tetap menempati posisi dua teratas sebagai wilayah dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak, masing-masing sebanyak 19.730 usaha (24,66 persen) dan 17.325 usaha (21,66 persen). Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat menjadi dua wilayah dengan jumlah pelaku UMKM paling sedikit, yakni hanya 1.176 usaha (1,47 persen) dan 9.280 usaha (19,38 persen) dari total pelaku UMKM di DKI Jakarta.

Berdasarkan kelompok industri, mayoritas pelaku UMKM di DKI Jakarta bergerak di sektor industri makanan (KBLI 10) dan industri pakaian jadi (KBLI 14). Usaha IMK di sektor makanan tercatat sebanyak 50.166 unit usaha, yang mencakup 62,71 persen dari total pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, usaha di sektor pakaian jadi berjumlah 14.031 unit atau 17,54 persen. Rincian lebih lanjut didasarkan pada hasil pendataan

sensus UMKM DKI Jakarta oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tahun 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Banyaknya Usaha/Perusahaan IMK di Provinsi DKI Jakarta menurut KBLI 2 Digit di DKI Jakarta (unit), 2023**

| Nomor KBLI | Kategori   | Jumlah (Unit) |
|------------|--|---------------|
| 10         | Industri Makanan   | 50.166        |
| 14         | Industri Pakaian Jadi  | 14.031        |
| 18         | Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman   | 2.359         |
| 31         | Industri Furnitur  | 2.136         |
| 11         | Industri Minuman   | 2.013         |
| 13         | Industri Tekstil   | 1.960         |
| 25         | Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya   | 1.955         |
| 32         | Industri Pengolahan Lainnya  | 1.464         |
| 15         | Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki   | 1.018         |
| 16         | Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya | 941           |
| -          | Lainnya  | 1.949         |

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sebaran pelaku UMKM di DKI Jakarta sangatlah banyak, baik dari segi jumlah pelaku usaha di setiap wilayah maupun berdasarkan kategori usaha yang mereka jalankan. Jumlah ini mencerminkan hasil dari upaya yang dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Namun, menurut Meutya selaku Menteri Komunikasi Digital Republik Indonesia, masih terdapat tantangan dalam hal pemanfaatan ruang digital oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data yang tersedia, hanya sekitar 38,7 persen pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam menyokong aktivitas operasional dan pemasaran usaha mereka, meskipun angka ini telah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022, di mana persentasenya tercatat sebesar 34 persen (Ida & Siti, 2024). Sehingga walaupun terdapat

perkembangan positif, jumlah tersebut masih dinilai jauh dari optimal, terutama jika dilihat dari pesatnya percepatan digitalisasi yang sedang berlangsung di berbagai sektor lainnya.

Pada penelitian lain yang dirujuk oleh Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2022 menyatakan bahwa sebanyak 77,5% UMKM tidak menyangkut sistem pembukuan yang baik, alhasil mengalami kesulitan dalam membina keuangan perusahaan sebagaimana aturan (Nurhidayah, 2024). Menurut Alfira Nay et al., (2023), usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sering menghadapi kendala baik penurunan profit. Banyak dari mereka yang tidak membuat laporan keuangan tahunan, akibatnya sulit untuk menilai kemajuan bisnis mereka. Para pelaku usaha selalu mengabaikan aspek penting dalam manajemen keuangan ini dan akibatnya, 90% UKM tidak dapat bertahan lama di pasar (MRB Finance, 2020). Adapun menurut Metzler, imbas dari masalah ini memang tak eksplisit, tetapi tanpa mekanisme akuntansi yang sistematis, pelaku usaha tidak akan bisa memahami bisnis mereka secara menyeluruh, yang bisa berujung pada kebangkrutan (Santiago & Estiningrum, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya langkah strategis yang lebih intensif untuk mendorong pelaku UMKM agar semakin terlibat dalam transformasi digital terutama pada sistem informasi akuntansi, sehingga mereka dapat lebih kompetitif dan sanggup beradaptasi terhadap modifikasi teknologi yang kian berkembang.

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar terhadap kemajuan dan efisiensi operasional di berbagai sektor bisnis. Inovasi

teknologi menjadi pendorong utama pertumbuhan di dunia perdagangan, memberikan dukungan penting bagi pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka, serta berperan krusial dalam mendorong inklusi keuangan di tingkat nasional (Arazy et al., 2024) . Menurut Zeta Azzahrona et al., (2022) , teknologi informasi kini menjadi hal yang wajib dikuasai bagi para pelaku UMKM, terutama dalam hal penerapan sistem informasi akuntansi. Pemakaian teknologi informasi ini dapat meningkatkan kinerja UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, unit usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peluang untuk memasuki pasar global. Selain itu, pengaplikasian sistem informasi akuntansi memungkinkan UMKM dalam mengotomatisasi proses akuntansi mereka, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperoleh informasi keuangan yang tepat dan terkini (Revalina & Salma Azahra, 2021).

Berdasarkan tabel 1.1, industri makanan menjadi bidang usaha dengan jumlah unit UMKM terbanyak di DKI Jakarta per tahun 2023. Pada bidang usaha ini, salah satu kegiatan sistem informasi akuntansi yang mampu diterapkan yaitu sistem informasi akuntansi persediaan. Namun, menurut Febriyanto dalam (Putri & Fatma Ginoga, 2022), masih banyak UMKM yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi serta menunjukkan bahwa sekitar 56,92% UMKM masih abai terhadap pencatatan persediaan, dan 16,92% tidak melakukan pencatatan transaksi penjualan usahanya. Persediaan sendiri memegang peranan penting pada bidang usaha ini, karena jika tidak diperhatikan, maka akan timbul permasalahan seperti

lebihnya persediaan yang akhirnya menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan dan pemeliharaan, serta memperbesar risiko kerusakan bahan baku. Sebaliknya, ketidaklengkapan persediaan bahan baku dapat berakibat terhadap keterlambatan dalam proses produksi, dan pada akhirnya mengganggu kelancaran operasional produksi. Sehingga diperlukannya pengelolaan persediaan yang baik bagi pelaku usaha di bidang ini agar dapat meminimalisir kekurangan tersebut (Parida et al., 2022a). Sistem persediaan barang juga diperlukan untuk memantau ketersediaan barang di gudang, sehingga kebutuhan persediaan untuk mendukung aktivitas operasional dapat terpenuhi secara sigap dan tepat (Ramadana & Irawan, 2024).

Sistem informasi akuntansi persediaan sendiri merupakan sistem yang mengakumulasi, merekam, dan mengkaji data mengenai semua transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dan bahan baku. Hal ini mencakup pencatatan pembelian, penjualan, serta pengembalian barang, yang memungkinkan UMKM untuk memantau jumlah persediaan secara akurat dan real-time (Melania, 2022). Menurut Parida et al. (2022), sistem persediaan adalah sistem yang digunakan untuk menangani aktivitas penerimaan dan pemanfaatan aset, yang mencakup informasi terkait persediaan. Sistem ini mengefisienkan pencatatan inventaris dan mengakomodasi penyelesaian masalah dalam pengolahan data barang, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan.

Dalam upaya peneliti terhadap pemecahan permasalahan tersebut, peneliti telah melakukan wawancara singkat bersama salah satu pemilik

UMKM di bidang industri makanan yaitu UMKM X. Usaha ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi pempek, salah satu makanan tradisional Palembang. UMKM X sendiri berbasis di Cirebon, namun memiliki banyak cabang dengan Jakarta sebagai salah satu kota alokasinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini, UMKM X belum memiliki sistem pencatatan persediaan yang terintegrasi. Proses pencatatan masih dilaksanakan secara konvensional yaitu dengan menggunakan pencatatan melalui buku, baik dalam hal pembelian bahan baku, pengeluaran bahan, maupun pemantauan stok akhir. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data persediaan. Terlebih lagi, dengan adanya cabang di beberapa kota, pemilik usaha mengalami kesulitan dalam memantau jumlah persediaan secara *realtime* dan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengelolaan persediaan yang efektif dan sistem pencatatan yang saat ini digunakan oleh UMKM X. Ketiadaan sistem informasi akuntansi yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti kelebihan atau kekurangan stok, keterlambatan pemesanan bahan baku, serta kesalahan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya perancangan sistem informasi akuntansi persediaan yang dapat membantu UMKM seperti UMKM X dalam mengelola persediaan secara lebih sistematis, akurat, dan terintegrasi.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, seperti menurut penelitian Rosmayati & Ganesha (2022), menjelaskan bahwa masalah atau kendala yang dihadapi bagi suatu usaha terhadap keuntungan adalah sulitnya melakukan control barang. Hal ini disebabkan karena belum memaksimalkan sistem terkomputerisasi. Penelitian ini menghasilkan perangkat lunak yang mampu memberikan informasi persediaan barang dagang dengan tepat dalam perubahan stok yang tersedia, selain itu dapat memberikan informasi data barang masuk secara keseluruhan maupun periode, serta penambahan dapat memberikan informasi harga pokok penjualan. Selain itu, penelitian oleh (Pratama et al., 2023) , menjelaskan bahwa proses pencatatan persediaan konvensional menyebabkan beberapa masalah, seperti kurangnya penjadwalan yang jelas untuk pengadaan stok bahan baku produksi, seringkali kekurangan bahan baku dalam produksi, kesalahan dalam pemesanan yang mengakibatkan kelebihan stok bahan baku produksi, dan adanya perbedaan antara perhitungan stok yang tersedia dengan penggunaan bahan baku produksi. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang menyediakan pengolahan data monitoring stok bahan baku produksi yang dilengkapi dengan kontroling master data barang, pengadaan barang, barang masuk, stok opname, dan laporan.

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh UMKM X serta didukung penelitian sebelumnya yang telah membuat konsep rancang bangun sebuah sistem. Maka peneliti akan membuat sebuah rancang bangun sistem informasi akuntansi persediaan agar dapat mempermudah proses pencatatan persediaan

masuk dan keluar pada UMKM di bidang usaha makanan. Adapun *output* dari penelitian ini ialah desain sistem informasi akuntansi persediaan berbasis Ms. Excel sederhana dengan harapan sistem tersebut dapat dikaji menjadi sistem yang dapat dipakai dan mudah dipahami oleh pihak UMKM yang diteliti. Sistem yang baik diperlukan dalam meningkatkan margin sebuah produk. Dengan ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada usaha UMKM X dengan judul **“Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Menggunakan Metode *Waterfall* pada UMKM X”**

## 1.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi akuntansi persediaan yang terstruktur dan terkomputerisasi pada UMKM X, sebuah usaha yang bergerak pada bidang produksi makanan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem pencatatan persediaan yang sesuai dengan karakteristik operasional UMKM, serta mengembangkan solusi berbasis teknologi yang mampu mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan persediaan secara lebih efisien dan akurat.

Dengan menggunakan metode *Waterfall* dalam perancangan sistem, penelitian ini memfokuskan pada tahapan analisis serta perancangan dan desain sistem. Dimana sistem yang dirancang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi oleh UMKM X.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan persediaan yang saat ini diterapkan pada usaha UMKM X?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM X dengan metode pencatatan yang ada?
3. Bagaimana harapan UMKM X terhadap kondisi informasi persediaan usaha?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan peneliti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengelolaan persediaan yang saat ini diterapkan pada usaha UMKM X.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh UMKM X dengan metode pencatatan yang ada.
3. Membuat konsep rancang bangun Sistem Informasi Akuntansi Persediaan berbasis Ms. Excel sesuai dengan harapan UMKM X terhadap kondisi informasi persediaan usaha.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat mendukung penggunaan Metode *Waterfall* yang merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan sebuah sistem.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas topik serupa, khususnya terkait perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini bagi narasumber adalah:

- a. Meningkatkan Efisiensi Pencatatan Persediaan

Sistem yang dirancang dapat membantu UMKM dalam mencatat arus masuk dan keluar persediaan secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan manual.

- b. Mempermudah Monitoring Stok

Pemilik usaha dapat dengan mudah memantau jumlah persediaan secara real-time, sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang berlebihan.

- c. Meminimalkan Risiko Kehilangan atau Kerusakan Barang

Sistem ini dapat memberikan peringatan dini terkait persediaan yang mendekati batas minimum atau barang yang mendekati masa kedaluwarsa, sehingga dapat mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan barang.

d. Mengurangi Ketergantungan pada Proses Manual

Implementasi sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama.

